

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan nasional selalu diupayakan dalam rangka meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai proses pengembangan keseluruhan aspek dan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam tujuan pembangunan nasional.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan nasional adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam suatu wadah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat. Titik tekan pembangunan nasional dimaksud terletak pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama dalam segala proses pembangunan yang beriringan dengan kualitas sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pembangunan nasional memiliki keterkaitan, saling memperkuat dan dijalankan secara terpadu dengan proses pembangunan di bidang lainnya. Keserasian dan keselarasan dimaksud ditujukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Berbagai indikator dapat digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan di suatu daerah, baik indikator ekonomi maupun indikator sosial. Dalam konteks masyarakat sebagai obyek pembangunan, maka diperlukan suatu indikator untuk mengukur perkembangan kehidupan/tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk melihat tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi secara umum, indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk melihat gambaran tingkat kesejahteraan sosial dalam arti lebih sempit, dapat digunakan Indeks Mutu Hidup (IMH) karena indikator IMH hanya mempertimbangkan variabel-variabel sosial saja.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang

ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.¹

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Cobb-Douglas mengemukakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas *human capital*-nya. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya.²

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu bagian dari wilayah Republik Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai bidang. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat kualitas manusia dalam suatu daerah yang berguna untuk memajukan daerah tersebut. Pembangunan ekonomi diantaranya bertujuan mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan

¹ Bappenas, BPS, UNDP (2004), "*Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004, Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan pembangunan Manusia Di Indonesia*", Bappenas, BPS, UNDP. Jakarta

² Todaro M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

ketimpangan pendapatan, serta berujung pada pengentasan kemiskinan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan sendiri merupakan suatu keadaan dimana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut.

Baik pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang dimaksud, pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa membentuk suatu badan atau lembaga keuangan yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yakni suatu lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya. Selain itu, lembaga dimaksud juga dapat mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.³ Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang di atur dan dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintahan desa sebagai upaya memperkuat taraf perekonomian desa sehingga lembaga dimaksud dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Kesejahteraan sosial dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad saw. adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya.⁴ Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat.

Ajaran syariah Islam memang menuntut para pemeluknya untuk berlaku secara profesional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan.⁵ Tuntutan inilah yang mendorong untuk menunjukkan tentang bagaimana ekonomi Islam memberikan alternatif dalam kejelasan konsep kesejahteraan tersebut.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya.

⁴ *Ibid.*, 89

⁵ Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, 1.

Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkanNya dan menjauhi apa yang dilarangnya.⁶

Keadaan ini sangat dianjurkan agama karena akan memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Berkaitan dengan itu, pada prinsipnya implementasi program BUM Desa sejalan dengan apa yang di firmankan Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ



إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. al-Ma'idah: 02)⁷

Selain itu, pinjaman dana yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan. Demikian juga, Badan Usaha Miliki Desa (BUM Desa) memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

⁶ Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalaam, *Prototype Negeri Yang Damai*, Surabaya: Media Idaman Press, 1994, 66-68.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Al-Hikmah*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004, 106.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS: al-Mujadalah: 11)⁸

Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki keterkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan dimaksud yaitu meningkatnya segala kondisi kehidupan dan terjadinya keseimbangan sosial masyarakat baik secara jasmani maupun rohani. Upaya peningkatan kondisi dimaksud dilakukan dengan membina, menumbuhkan dan mengembangkan keselarasan dalam kehidupan manusia serta dengan menciptakan kondisi lingkungan yang baik, baik secara fisik dan mental maupun kondisi sosial.

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan peneliti di Kabupaten Indramayu diketahui bahwa keberadaan BUM Desa termasuk pengguna dana BUM Desa di berbagai bidang ternyata belum terlihat perkembangannya. Usaha masyarakat pengguna dana BUM Desa tersebut misalnya di bidang jasa pengelolaan sampah, simpan pinjam, ternak kambing dan sapi, dan PDAM Desa belum menunjukkan ada peningkatan

⁸*Ibid.*, 542.

kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang masih menjadi nasabah di koperasi simpan pinjam kapitalisme yang beredar di tengah masyarakat Kabupaten Indramayu.

Desa menjadi bagian pemerintahan unit terkecil dari sebuah negara yang dalam prakteknya paling dekat dengan masyarakat. Secara langsung, desa bersentuhan dengan berbagai kebutuhan masyarakat yang menuntut untuk disejahterakan. Desa sebagai wakil negara memiliki kewajiban melakukan pembangunan baik secara fisik maupun sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat desa yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan hal tersebut maka dibutuhkan dua jenis pendekatan, yakni: *pertama*, kebutuhan masyarakat dalam melakukan berbagai perubahan sekaligus mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan, dan *kedua*, adanya *political will* dan juga kemampuan dari pemerintah desa secara bersama-sama dengan masyarakat dalam upaya mengimplementasikan berbagai bentuk perencanaan pembangunan yang sudah disusun sebelumnya.⁹

Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Indramayu pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui adanya peningkatan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat sebagaimana hal itu juga menjadi indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM

⁹ Bahrein, T Sugihen. (1997). *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 51

menunjukkan kurangnya pemerataan pembangunan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan sebagaimana disebutkan di atas, peneliti merasa tertarik untuk menggali lebih jauh berkaitan dengan peranan BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam di Kabupaten Indramayu.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang ada di Kabupaten Indramayu ialah masih terjadinya kesenjangan sosial akibat ketidakmerataan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat yaitu terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan BUM Desa sebagai wahana dalam mengoptimalkan segala potensi yang ada di Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan fenomena sebagaimana dijelaskan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan lebih dalam terkait permasalahan dimaksud. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan lahirnya dasar hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana kajian ekonomi Islam pada pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Indramayu?

3. Bagaimana kondisi objektif Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Indramayu?
4. Apa saja problematika pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Indramayu?
5. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan lahirnya dasar hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Indramayu;
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kajian ekonomi Islam pada pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Indramayu;
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi objektif Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Indramayu;
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan problematika pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Indramayu; dan
5. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu kesejahteraan sosial pada khususnya terkait dengan peran BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan input positif bagi pelaksanaan kebijakan BUM Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, agar menjadikan pendorong peningkatan kinerja suatu lembaga dalam mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indramayu.

D. Kerangka Pemikiran

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUM Desa adalah suatu bentuk usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat diperlukan oleh desa-desa di Indonesia sebagai sumber ekonomi untuk meningkatkan pendapatan desa serta masyarakat desa. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dibutuhkan baik dalam pembentukan, pelaksanaan maupun pengelolaan BUM Desa tersebut, agar hasil usaha dari BUM Desa dapat dirasakan tidak hanya oleh pemerintah desa melainkan juga masyarakat desa.

Jenis lembaga dimaksud menjadi salah satu pilar dalam pembangunan desa yang mulai digalakkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, BUM Desa diharapkan memiliki peran dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa sekaligus peningkatan terhadap perekonomian desa.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya.¹⁰

Konsep kesejahteraan dalam pandangan Islam setidaknya dapat dilihat pada tiga aspek, yaitu: *Pertama*, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian "Islam" yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. *Kedua*, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan

¹⁰ Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalaam, *Prototype Negeri Yang Damai*, Surabaya: Media Idaman Press, 1994, 66-68

amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. *Ketiga*, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.¹¹

Salah satu pengertian dari ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah pekerti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. Oleh karenanya sistem ekonomi apapun termasuk ekonomi Islam yang diterapkan di dunia ini akan selalu berkaitan dengan tiga masalah utama perekonomian (*The Three Fundamental and Interdependent Economic Problem*). Ketiga masalah tersebut adalah barang apa dan berapa jumlahnya, cara dibuatnya dan untuk siapa distribusinya.¹²

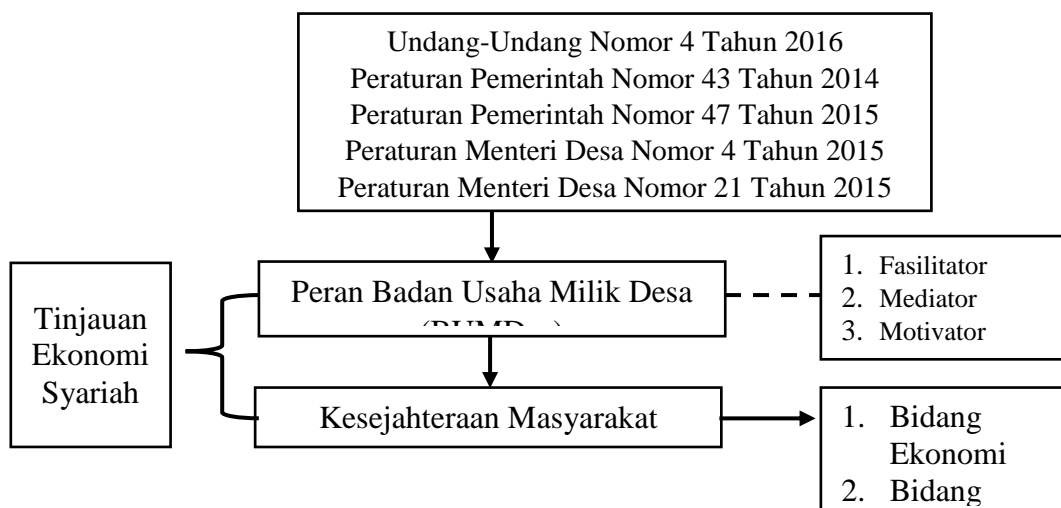
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diharapkan dapat mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat baik melalui pinjaman dana, pendidikan, konsultasi dan bimbingan yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan

¹¹ Ikhwan Abidin Basri. *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, 85-87

¹² Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi Edisi Keduabelas Jilid I*, terj. Jaka Wasana, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989, 29-30.

kualitas hidup masyarakat sebagai masyarakat sejahtera. Kesejahteraan menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).¹³

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. *World Health Organization* (WHO) mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.¹⁴ Penulis menyusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

¹³ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, 887

¹⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012, 8

E. Kajian Kepustakaan

Studi kepustakaan menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Melalui studi kepustakaan, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Ade Eka Kurniawan (2015) dengan judul: *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga)*.¹⁵ Dari hasil penelitian dimaksud diketahui bahwa peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli Desa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang di inginkan hanya meningkat Rp. 3.940.000 saja. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti terletak pada objek penelitian yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Indramayu.

¹⁵ Ade Eka Kurniawan, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga)*. Jurnal. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Umrah Tanjungpinang. 2015

2. Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni (2016) dengan judul: *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Yogyakarta*.¹⁶ Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.

Perbedaan dengan yang akan penulis teliti terletak pada tinjauan ekonomi dalam perspektif Islam, juga lokus penelitian yang berbeda.

3. Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo (2013) dengan judul: *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*.¹⁷ Hasil penelitian menyebutkan bahwa keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong

¹⁶ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Yogyakarta*. Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta. MODUS Vol.28 (2): 155-167, 2016

¹⁷ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076

pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

Perbedaan dengan yang akan penulis teliti terletak pada objek penelitian yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Indramayu yang dikaji pula berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

4. Helmei Willy Amanda (2015) dengan judul: *Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan BPAM dalam BUMDes dibutuhkan di Desa Ketapanrame selain untuk memberikan air bersih kepada seluruh warga, juga menambah pendapatan desa. Meskipun strategi pembangunan desa melalui BUMDes pada BPAM bisa dikatakan sudah optimal dalam pencapaiannya mensejahterakan masyarakat di Desa Ketapanrame, tidak menutup kemungkinan akan muncul masalah-masalah terkait pengelolaan BUMDes. Untuk itu pengurus BUMDes Tirto Tentrem diharapkan mampu meningkatkan sistem pengelolaannya, sehingga dapat mempertahankan pencapaian tujuan BUMDes. Mengalokasikan dana BUMDes untuk menanggung biaya pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan sarana dan prasarana desa. Mengoptimalkan peran Kepala Desa Ketapanrame sebagai penasehat, tidak hanya memantau perkembangan berdasarkan informasi dari pengawas.

¹⁸ Helmei Willy Amanda, *Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya. 2015

Perbedaan dengan yang akan penulis teliti terletak pada objek penelitian yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Indramayu, yang bukan saja dilihat pada strategi, tapi juga implementasi Badan usaha Milik Desa di Kabupaten Indramayu.

5. Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal (2015) dengan judul: *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*.¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya. Bagi pihak BUMDes harus kontroling dan sekaligus memberikan pandangan yang lebih baik kepada pengguna dana BUMDes tersebut.

Selain lokus penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini akan dibahas bukan saja mengenai peningkatan ekonomi tetapi lebih umum pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam tulisan ini akan diperkuat juga pada implementasi BUM Desa pada tinjauan ekonomi Islam.

¹⁹ Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal, *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*. Jurnal. Universitas Atmajaya. 2015

6. Ida Purwastuty (2018) dengan judul: *Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Aset Komunitas*.²⁰ Hasil penelitian dimaksud menunjukkan bahwa pemberdayaan keluarga miskin dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aset komunitas yang ada di sekitar tempat tinggalnya baik aset fisik, aset finansial, aset manusia, aset social dan aset spiritual. Aset fisik dapat digunakan sebagai tempat berkumpul dari keluarga miskin dan *stakeholder* dalam proses pemberdayaan keluarga miskin, aset finansial dapat dioptimalkan untuk peminjaman uang atau modal agar tidak ke rentenir seperti koperasi, aset manusia dapat dioptimalkan untuk membantu dalam memberikan dukungan seperti *stakeholder*, aset sosial dapat dioptimalkan sebagai ikatan (*bounding*) untuk saling membantu dan berdaya antara *powerfull* dan *powerless*, dan aset spiritual dapat dioptimalkan sebagai dasar membantu sesama. Perbedaan dengan yang akan penulis teliti terletak pada lokus dan objek penelitian yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Indramayu yang dikaji pula berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Lokus dimaksud adalah kondisi geografis daerah yang memiliki karakteristik masing-masing yang satu sama lain memiliki ciri khas tersendiri. Sehingga pada implementasinya juga diperkirakan akan berbeda.
7. Dantika Ovi Era Tama (2013) dengan judul: *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa*

²⁰ Ida Purwastuty, *Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Aset Komunitas*, Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, Edisi I, November 2018, 2018

*Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.*²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalan secara keseluruhan. BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES. Selain itu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi membuat BUMDES Karangrejek semakin maju.

Perbedaan dengan yang akan penulis teliti terletak pada lokus penelitian yang secara implementasi diperkirakan juga akan berbeda, terlebih kondisi geografis tiap daerah memiliki karakteristik masing-masing yang satu sama lain memiliki ciri khas tersendiri.

8. Edy Yusuf Agunggunanto (2016) dengan judul: *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).*²² Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas,

²¹ Dantika Ovi Era Tama, *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.* Jurnal. Vol Nov, No 1. 2013

²² Edy Yusuf Agunggunanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).* Jurnal. Vol. 13 No. 1 Universitas Diponegoro Semarang. 2016

keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Perbedaan dengan kajian yang akan penulis teliti berada pada fokus penelitian yang di fokuskan pada peranan BUM Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang di dukung melalui telaah ekonomi perspektif Islam berkaitan dengan implementasi BUM Desa di kabupaten Indramayu.

Berdasarkan paparan tema kajian yang telah penulis sebutkan di atas, penulis merasa terdorong untuk meneliti lebih dalam berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam di Kabupaten Indramayu.

F. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Asset Based Comunity Development* (ABCD), peneliti menggunakan metode ini karena metode ABCD ini mengajak kita untuk melihat pertama sebagai hadiah untuk masyarakat dari apa yang mereka inginkan, pengetahuan dan keterampilan

serta sumberdaya lainnya yang kadang-kadang dapat disembunyikan, namun sering terabaikan atau diberhentikan karena tidak signifikan.²³

Metode Penelitian berbasis aset ABCD adalah tentang membuat suatu hubungan. Ini adalah tentang menemukan suatu hubungan yang sudah ada di lingkungan, dan membantu untuk membangun hubungan yang baru dengan sekitarnya sehingga hadiah dapat dibagikan.²⁴

Pengembangan masyarakat dengan metode ABCD, muncul saat masyarakat telah yakin bahwa aset adalah sesuatu paling penting bagi masyarakat yang dibutuhkan untuk tumbuh dan belajar, dalam membesarkan anak-anak, sehingga merasa aman dan aman, sehat, usia baik dan bertindak untuk mengubah dunia.²⁵

Pembangunan aset dimulai dengan sebuah komunitas atau organisasi belajar menghargai aset yang mereka miliki. Banyak komunitas yang mengabaikan atau tidak menganggap serius nilai dari aset yang sudah mereka miliki. Belajar untuk mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki, lalu mulai memperhitungkannya sebagai aset potensial untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan pemahaman kunci dari tradisi yang lahir dari pendekatan pembangunan aset dan pelaksanaan berbasis aset.²⁶

Pendekatan berbasis aset adalah perpaduan antara metode bertindak dan cara berpikir tentang pembangunan. Pendekatan ini merupakan

²³ Al Barrett, *Asset-Based Community Development: A Theological Reflection*, Birmingham Vicar Of Hodge Hill Church, 2013, 2.

²⁴ *Ibid*, 5

²⁵ *Ibid*, 3.

²⁶ Christopher Dureau, *Pembaru dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan*, Canberra: Australian Community Development And Civil Society Strengthening Scheme (Access) Phase ii, 2013, 41.

pergeseran yang penting sekaligus radikal dari pandangan yang berlaku saat ini tentang pembangunan serta menyentuh setiap aspek dalam cara kita terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. melihat metode lain yang mengembangkan masyarakat melalui masalah yang akan diatasi kemudian memulai proses interaksi dengan analisis pohon masalah, pendekatan berbasis aset ini berfokus pada sejarah keberhasilan yang telah dicapai; menemu kenali para pembaru atau orang-orang yang telah sukses dan menghargai potensi melakukan mobilisasi serta mengaitkan kekuatan dan aset yang ada.²⁷

Menurut Susan A Rans, pembangunan masyarakat berbasis aset dimulai dengan asumsi bahwa sukses membangun komunitas melibatkan menemukan kembali dan memobilisasi sumber daya yang sudah ada dalam setiap komunitas:²⁸ 1) keterampilan dan sumber daya individu; 2) kekuatan asosiasi sukarela, dicapai melalui membangun hubungan; dan 3) Aset hadir dalam berbagai lembaga lokal, infrastruktur fisik masyarakat dan ekonomi.

Menurut pemikiran di balik pendekatan pendekatan berbasis aset, dengan fokus pada yang tidak bekerja atau melihat kebutuhan dan masalah ketimbang melihat apa yang sudah bekerja dengan baik, seorang agen perubahan menghalangi orang lain menemukan bahwa mereka sudah memiliki banyak kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola proses perubahan mereka sendiri.

²⁷ *Ibid*, 39.

²⁸ Susan A. Rans, *Hidden Treasures: Building Community Connections By Engaging The Gifts Of People On Welfare, People With Disabilities, People With Mental Illness, Older Adults, Young People*, Evanston: A Community Building Workbook, 2005, 2

Pendekatan ABCD mengevaluasi bagaimana sumber daya dalam komunitas digunakan dan sumber daya atau aset tambahan apa yang masih bisa dimobilisasi dengan efektif. ABCD mempelajari kapasitas dalam komunitas untuk memimpin diri sendiri atau untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan. Biasanya evaluasi ABCD akan melihat peningkatan kapasitas komunitas untuk mengorganisir dan memobilisasi sumber daya, peningkatan aksi bersama, keanggotaan yang lebih demokratis dan inklusif, peningkatan motivasi untuk memobilisasi sumber daya.

b. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebab metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi peneliti pada saat memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.²⁹

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

1. Pengamatan (Observasi)

²⁹ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 1-2

Observasi dilakukan terhadap implementasi BUM Desa di Kabupaten Indramayu. Peneliti melakukan pengamatan kemudian mencoba mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peran BUM Desa di Kabupaten Indramayu.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di tempat yang sudah disepakati antara peneliti dan informan. Pada saat wawancara, percakapan antara informan dan peneliti direkam menggunakan alat perekam suara yang telah disepakati oleh peneliti dan informan. Hal tersebut tidak mengganggu jalannya wawancara sebab hal-hal yang sekiranya tidak dapat dipublikasikan atas permintaan informan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Mengenai waktu wawancara disesuaikan dengan aktivitas yang dijalani informan.

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan Ketua BUM Desa Kabupaten Indramayu, Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Indramayu.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Indramayu.

d. Menentukan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*. Menurut Sugiono, *purposive sample* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.³⁰ Sementara menurut Jogiyanto menyatakan bahwa:

“Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (judgement) tertentu atau jatah (quota) tertentu. Judgement sampling adalah purposive sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Sedangkan quota sampling berdalih bahwa sampel harus mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh populasinya.³¹”

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua BUM Desa, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Indramayu.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain.

e. Prosedur dan Tahapan Penelitian

³⁰ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 85

³¹ Jogiyanto, H.M. 2007. *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE, 79

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah, mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.³² Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Reduksi Data

Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

³² Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 173

2. Triangulasi Data

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.³³

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda,³⁴ yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

3. Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan,

330 ³³ Moleong Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,

³⁴ Nasution. 2003. *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 115

kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.